

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2009

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-9
Kebenaran di Dalam Diri Kita	11
Pengantar	13-18

SAJIAN KHUSUS

Menata Kembali Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara Menuju Peradaban Baru Indonesia <i>Nurcholish Madjid</i>	21-32
Menuju Peradaban Baru Indonesia: Mempertegas Kontribusi Islam dan Budaya Lokal dalam Menata Kembali Kehidupan Berbangsa dan Bernegara <i>Nur A. Fadhil Lubis</i>	33-50
Memperkokuh Relasi Sosial Menuju Indonesia Baru <i>Nurman Said</i>	51-65

ARTIKEL

Islam, Indonesia, dan Demokrasi <i>Yudi Latif</i>	69-92
--	-------

DAFTAR ISI

Multikulturalisme: Wawasan Alternatif Mengelola Kemajemukan Bangsa <i>Asman Aziz</i>	93-121
Esoterisme dan Kesatuan Agama-agama <i>Media Zainul Bahri</i>	123-150
Mempersoalkan “Sufisme Urban”: Sebuah Catatan Sederhana <i>Kautsar Azhari Noer</i>	151-166
Meditasi Kesadaran dan Kebaikan-Cinta <i>Dammarakkhita</i>	167-177

RESENSI BUKU

Islam Indonesia: Negosiasi Tanpa Henti <i>Sunaryo</i>	181-185
Muslimah Feminis: Sebuah Pernyataan Identitas Perempuan <i>Neneng Nurjanah</i>	187-183

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	195-196
Pindah Alamat	197
Ucapan Terima Kasih	198
Pembetulan	199
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	200

MENATA KEMBALI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA

Nurcholish Madjid

Perkembangan negara dan masyarakat kita menuntut pembangunan sumber daya manusia yang jauh lebih luas jangkauan wawasannya dan lebih tinggi tingkat kecakapannya daripada yang sampai saat ini telah terwujud. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah investasi kemanusiaan (*human investment*) yang dipandang sebagai tugas utama universitas. Perkembangan sejarah dunia modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidaklah terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terpendam dalam bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini, bahkan di angkasa luar sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu. Dengan kata lain, kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh segi-segi kuantitatif bangsa itu, baik berkenaan dengan kekayaan alam maupun jumlah warganya. Kejayaan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya bangsa itu. Dari sudut pandang inilah dapat dimengerti mengapa bangsa kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain, termasuk oleh bangsa-bangsa tetangga terdekat.

Jika kita bicara tentang investasi kemanusiaan, maka wujud nyata dari investasi itu ialah pendidikan, yang berpuncak pada pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, di zaman modern ini, perguruan tinggi dengan kegiatan pendidikan dan penelitiannya merupakan pusat kreativitas budaya bangsa dan barisan terdepan pengembangan budaya itu ke arah kemajuan-kemajuan baru. Sekalipun tidak secara keseluruhannya sama dengan perguruan-perguruan tinggi di negara lain, perguruan-perguruan tinggi kita telah menunjukkan kemampuan yang sepadan dalam memainkan peran mendorong kreativitas budaya nasional dan memacu kemajuan bangsa. Pikiran-pikiran terbaik bangsa senantiasa timbul dari kalangan universitas, dan terobosan-terobosan kemajuan bangsa juga diperankan oleh kalangan universitas. Hal itu terbukti dengan nyata sekali oleh keberhasilan gerakan reformasi yang kini mulai kita rasakan manfaat dan maslahatnya. Gerakan reformasi itu sepenuhnya dimulai dari kalangan universitas, khususnya kalangan mahasiswa dengan jiwa kepeloporannya dan orientasi masa depannya.

Logika Reformasi

Bertitik tolak dari keberhasilan gerakan reformasi itu, sudah sepatutnya kita semua, tanpa kecuali, ikut melibatkan diri dalam usaha bersama mencari jalan memperbaiki keadaan secara menyeluruh. Logika gerakan reformasi ialah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang berlaku, dan usaha mendapatkan bentuk keadaan yang lebih baik. Karena logika itu, maka suatu reformasi tidak mungkin dimulai dari titik nol atau titik ketiadaan, betapapun radikal dan fundamentalnya perbaikan yang diusahakan. Justru keberhasilan gerakan reformasi harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari tingkat kemajuan masyarakat dan dinamika perkembangannya. Maka pandangan yang hendak mempertahankan *status quo* dengan sendirinya akan tampil sebagai penghalang reformasi, sebab pandangan itu merupakan suatu ben-

tuk pengingkaran terhadap logika perkembangan masyarakat yang terus maju dan meningkat.

Hakikat bangsa, negara dan masyarakat kita adalah hasil akumulasi pengalaman pembinaan dan pengembangan sejak masa-masa lalu yang jauh. Unsur-unsur asasi format kenegaraan kita mula-mula diletakkan oleh para pendiri negara. Dari hasil usaha mereka itulah kita sekarang mewarisi nilai-nilai asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai asasi itu, sebagaimana wajarnya, tercantum sebagai dasar-dasar negara dalam Mukadimah konstitusi kita, yang perangkat nilai itu lazim disebut Pancasila, dan konstitusi itupun dikenal sebagai UUD 45. Itulah nilai-nilai pijakan kita bersama dalam usaha membina dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam suatu struktur politik yang kita pilih dan tetapkan dalam konstitusi, dengan kemungkinan pengembangan dan perbaikan terus-menerus.

Prinsip Kemanusiaan Universal

Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada Tuhan ialah kesepakatan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka. Lepas dari kenyataan rumusan dan pengkalimatan formalnya sebagaimana terpatери dalam Mukadimah UUD, masing-masing nilai yang lima itu menciptakan suatu pandangan sosial-politik yang potensial sama dan selaras antara semua anggota masyarakat, mengikuti *common sense* masing-masing pribadi. Pandangan sosial-politik yang dihasilkannya itu semuanya absah belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan atau menghalangi jiwa dan semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan, tanpa diskriminasi atau pembedaan satu dari yang lain secara tidak benar. Justru paham kemanusiaan universal menghendaki agar kita percaya kepada potensi kebaikan setiap pribadi. Paham kemanusiaan universal juga menghendaki agar kita percaya kepada kebaikan bersama yang dihasilkan oleh dinamika wacana umum dan bebas, dengan mempertaruhkannya kepada bimbingan nurani

kemanusiaan universal itu. Karena itu, pikiran-pikiran regimental yang menghendaki penyeragaman pandangan masyarakat melalui kegiatan indoktrinasi artifisial adalah suatu gejala yang timbul hanya dari tiadanya kepercayaan kepada kebaikan kemanusiaan, dan kepada dinamika pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dalam suasana kebebasan yang wajar.

Dalam kenyataan sosiologis-historis, feodalisme dan paternalisme adalah pangkal pikiran-pikiran regimental, demikian juga pandangan yang negatif-pesimis kepada kemanusiaan. Karena itu penafsiran dan penjabaran nilai-nilai asas kenegaraan dan kemasayarakatan dalam Mukadimah UUD itu harus dibiarkan terbuka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Maka tidak dapat dibenarkan adanya penafsiran dan penjabaran dalam rumusan-rumusan yang dibuat “sekali dan untuk selamanya” oleh perorangan atau kelompok dengan klaim kewenangan atau otoritas eksklusif. Otoritarianisme dalam pikiran akan dengan sendirinya berkorelasi kuat dengan otoritarianisme dalam kehidupan sosial-politik dan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pengalaman kenegaraan semua bangsa, termasuk bangsa kita, otoritarianisme itu terbukti merupakan sumber utama malapetaka nasional. Di samping itu, suatu nilai asasi yang dijabarkan secara otoriter “sekali dan untuk selamanya” akan menjelma menjadi sebuah ideologi tertutup. Dan ideologi tertutup, karena logika internalnya sendiri yang tertutup, akan dengan sendirinya terancam untuk menjadi ketinggalan zaman, tidak relevan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang secara dinamis terus berkembang secara terbuka.

Kebebasan Nurani dan Kebebasan Beragama

Untuk prinsip bimbingan hidup (*guiding principle*), yang diperlukan oleh sebuah masyarakat bebas dan merdeka ialah kesetiaan pada kesucian nurani. Karena suara nurani selamanya bersifat individual, maka kesetiaan pada nurani melibatkan perlindungan pada kebebasan nurani (*freedom of conscience*). Dalam urutannya, kebe-

basan nurani mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama, karena dengan ajaran agama, melalui keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian nurani dikukuhkan.

Agama menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dada, yang merupakan milik pribadi orang bersangkutan yang paling mendalam dan berharga, karena berkaitan dengan kesadarannya akan makna dan tujuan hidupnya. Keimanan dan ketakwaan yang ada dalam dada itu merupakan wewenang suci Tuhan untuk mengetahui, mengukur dan menilainya, dan sama sekali di luar wewenang sesama manusia. Semua pandangan prinsipil itu diisyaratkan dalam nilai pertama Mukadimah UUD, yang secara amat tepat oleh Bung Hatta disebut sebagai prinsip yang menyinari nilai-nilai yang lain dalam Mukadimah itu.

Oleh karena itu, pengusikan dan pengingkaran hak individu dan sosial manusia karena pandangan keagamaan (karena mengatakan, “Pangeran kami ialah Tuhan Yang Maha Esa”), adalah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan nurani. Sebaliknya, demi kebebasan nurani itu maka masyarakat dan negara berkewajiban menjaga keutuhan semua pranata keagamaan seperti biara, gereja, sinagog dan masjid, karena pranata atau institusi keagamaan adalah sarana dan tempat ditanamkannya keimanan kepada Tuhan. (Untuk dasar pandangan-pandangan ini, lihat Q 22: 40).

Kesucian Manusia dan Prinsip Musyawarah

Dengan latar belakang adanya memori kolektif tentang berbagai bentuk pertentangan sosial dan kultural masa lampau, keperluan pada pengembangan sikap dan pandangan kemanusiaan yang positif optimis itu menjadi salah satu urgensi nasional. Masyarakat yang bahagia dengan kebebasan dan kemerdekaannya ialah masyarakat yang didukung oleh adanya jalinan hubungan cinta-kasih antara sesama manusia, dalam semangat cinta-kasih Ilahi yang suci (*rahmah*, *agapé*) yang merupakan kelanjutan dari cinta kearifan kemanusiaan horizontal (*mawaddah*, *philos*) dan cinta tingkat permulaan atas dasar

pertimbangan-pertimbangan bentuk lahiriah (*mahabbah, eros*). Dalam semangat cinta-kasih Ilahi itu terlahir sikap penghargaan yang tulus dan pandangan penuh harapan kepada sesama manusia. Karena fitrah dari Sang Khalik, setiap jiwa manusia adalah makhluk kesucian, kebaikan dan kebenaran, sebelum terbukti sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah harus dipandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat merusak fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya.

Karena faktor fitrah itu, maka setiap orang harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup rendah hati agar dapat melihat kemungkinan dirinya salah, dan untuk bersedia mendengarkan dan memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati untuk mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah, suatu bentuk interaksi sosial yang mengandung makna “saling memberi isyarat” tentang yang baik dan benar untuk semua.

Oleh karena itu, prinsip musyawarah tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan rusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan, adalah dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. Maka demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan

musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat, dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *a priori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

Pelaksanaan Kebebasan-kebebasan Asasi

Kebebasan asasi untuk menyatakan pendapat dengan sendirinya berakibat pada adanya dua kebebasan asasi yang lain, yaitu kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Keinginan untuk berkumpul dengan sesama (*le desire d'être ensemble*) adalah naluri manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan berkumpul juga merupakan keinginan untuk menyatakan pendapat secara bersama dan mewujudkan maksud pendapat itu dalam kegiatan bersama. Justru keinginan berkumpul dalam suatu tatanan sosial yang mengakui dan mendukung kebebasan berpendapat adalah prasarana penyatuan pendapat pribadi-pribadi melalui proses memberi dan mengambil secara positif. Maka keinginan berkumpul dapat dipandang sebagai bentuk pertama lembaga permusyawaratan.

Keinginan mewujudkan pandangan bersama itu dalam kerangka kegiatan tersusun atau terorganisasi menuntut adanya kebebasan asasi untuk berserikat. Masyarakat manusia terdiri dari pribadi-pribadi dengan minat dan perhatian yang beraneka ragam. Keanekaragaman akan menjadi pangkal adanya interaksi sosial yang subur dan produktif, selama mendapat penyaluran yang wajar dan dibimbing oleh komitmen para pribadi anggota masyarakat pada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sebaliknya, keseragaman artifisial melalui penggiringan dan mobilisasi masyarakat dalam sistem monolitik tidak saja memangkas potensi-potensi kreatif dalam masyarakat, tapi juga menghasilkan perasaan tersumbat yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekuatan destruktif.

Sekalipun pembentukan suatu serikat dapat dibuat untuk menampung aspirasi dan kegiatan di luar masalah politik seperti masalah keagamaan, budaya, seni, ekonomi, dan seterusnya, seri-

kat politik selamanya merupakan bentuk penting kebebasan asasi ketiga itu. Dengan serikat politik yang bebas, dan yang dibentuk karena panggilan tanggung jawab yang tulus dan murni terhadap masyarakat dan negara, suatu unsur penting lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sehat akan terwujud, yaitu unsur pengawasan dan pengimbangan. Komitmen individual masing-masing orang pada nilai-nilai luhur, yang merupakan prakondisi pertama masyarakat yang sehat, menuntut realisasi konkritnya berupa komitmen dan perilaku sosial dalam hidup bersama. Pada urutannya, demi mencegah terjadinya penyimpangan, baik sadar atau tidak sadar, komitmen dan perilaku sosial itu harus terbuka kepada pengawasan oleh sesama anggota masyarakat. Disebabkan oleh kelemahan pribadi manusia yang membuatnya secara potensial menjadi tawanan dikte situasi, posisi dan lingkungannya, pengawasan sosial yang bebas adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga jangan sampai masyarakat luas menjadi korban. Semua pihak harus menerima dengan rela ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk membuat suatu pengawasan sosial menjadi benar-benar efektif. Bentuk ketentuan-ketentuan itu ialah aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Komitmen pada Nilai-nilai Luhur

Komitmen pribadi pada nilai-nilai hidup yang luhur akan tidak bermakna apa-apa jika yang bersangkutan tidak mewujudkannya secara nyata dalam tindakan hidup pribadi sehari-hari. Oleh karena itu, komitmen pribadi pada nilai-nilai luhur dapat disederhanakan sebagai ketaatan pribadi itu pada aturan-aturan dan hukum-hukum yang dinyatakan berlaku untuk setiap orang. Tidak ada suatu bagian dari aturan dan hukum yang terlalu kecil untuk ditaati, dan tidak ada seorang pun yang cukup besar untuk dibenarkan melanggar aturan dan hukum itu, atau untuk mengklaim dispensasi dari ketentuan yang berlaku. Semua anggota masyarakat harus tunduk dan

patuh pada aturan dan hukum dengan sikap yang teguh, konsekuen, berdisiplin, dan penuh kesabaran dan ketabahan. Sekali suatu ketentuan aturan atau hukum ditawarkan untuk dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak, betapapun kecilnya ketentuan aturan dan hukum yang dilanggar itu, biarpun, misalnya, “sekadar” ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalan.

Diferensiasi Kekuasaan

Tegaknya hukum dan peraturan sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan yang berjalan secara efektif itu dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, terutama kekhususan bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tugas utama sistem pemerintahan dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya ialah kemampuan memelihara ketertiban, atau mengatur dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi ketertiban itu sendiri memerlukan parameter-parameter, berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Maka dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintahan secara keseluruhan berkewajiban memperhatikan agar parameter-parameter itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sendiri, khususnya kekuasaan eksekutif, memiliki fasilitas dan prasarana untuk melanggar ketentuan dengan dampak yang amat luas terhadap kehidupan masyarakat (*“power tends to corrupt”*), maka sistem pengawasan dan pengimbangan harus terlebih dahulu, dan terutama, diciptakan antara ketiga unsur kekuasaan itu sendiri, yaitu unsur-unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pengawasan dan pengimbangan yang efektif akan terwujud jika masing-masing dari ketiga unsur kekuasaan itu independen satu dari yang lain dan berkebebasan melaksanakan pengawasan dan pengimbangan satu sama lain.

Secara khusus, berkenaan dengan usaha penegakan hukum dan peraturan, sistem peradilan yang independen dan berfungsi secara penuh merupakan jaminan kelembagaan yang paling kuat bagi tegaknya hukum dan peraturan itu. Sebaliknya, sistem peradilan yang tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintahan eksekutif, juga pengaruh luar manapun, adalah salah satu jaminan paling pasti untuk runtuhnya ketentuan hukum dan peraturan.

Dalam hubungan interaktif antara ketiga unsur kekuasaan itu, badan legislatif dituntut untuk benar-benar memenuhi fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Badan legislatif yang berfungsi penuh karena absah melalui pemilihan umum yang bebas, terbuka dan demokratis merupakan faktor pengimbang dan pengawas terhadap keseluruhan proses dan struktur politik yang terjadi sebagai realisasi kedaulatan rakyat.

Kedaulatan Rakyat dan Ekonomi Rakyat

Pada hakikatnya, kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukadimah UUD 45 akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat itu. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman. Pemerintahan manapun pada gilirannya harus bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman terhadap negara, dan dalam keadaan yang sulit itu akan tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota masyarakat luas yang benar-benar berkepentingan akan keselamatan bangsa dan negara.

Karena itu kedaulatan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang-bidang lain, khususnya di

bidang ekonomi. Sesungguhnya, kedaulatan ekonomi inilah yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita bernegara. Sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut-punya dan rasa ikut-serta oleh semua. Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya nilai keadilan sosial dan dibiarkannya praktek-praktek kezaliman sosial berjalan dengan bebas dan merajalela. Kesalahan dalam politik ekonomi dan pembangunan selama dua atau tiga dasawarsa terakhir ini, sekalipun tidak dapat diramalkan dengan pasti sebelumnya, telah berujung dengan hancurnya kedaulatan rakyat dan negara berhadapan dengan tekanan dunia luar. Sekalipun kerugian akibat kesalahan tersebut menimpa dunia luar yang bersangkutan itu sendiri juga, namun yang paling parah ialah kerugian yang menimpa rakyat, pendiri, pembentuk dan pemilik negara yang sebenarnya.

Pada titik ini ide reformasi yang dipelopori mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi membentuk lingkaran penuh dan sempurna. Reformasi itu bertitik tolak dari komitmen masing-masing pribadi pada nilai kehidupan yang luhur, dan berakhir dengan komitmen kita semua pada usaha mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memperhatikan segenap potensi nasional kita, baik dalam artian sumber daya manusia maupun dalam artian sumber daya alam. Kita harus menjadikan potensi-potensi nyata itu sebagai modal dan pangkal pembangunan ekonomi rakyat patriotik. Pembangunan ekonomi nasional harus diubah arah sedemikian rupa sehingga lebih berpijak pada kenyataan-kenyataan nasional kita yang sebenarnya, dan tidak mengembara mengikuti gelembung fantasi, khayal dan iming-iming kemewahan dunia luar, yang ternyata telah berakhir dengan ancaman terhadap kedaulatan kita.

Ketangguhan ekonomi rakyat itu akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreativitas setinggi-tingginya. Kemandirian ekonomi nasional diwujudkan dengan handalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. Dalam sistem ekonomi global — suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan — hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk semua, tanpa merugikan pihak manapun juga. Dan dengan ketangguhan ekonomi nasional itu pula kita akan lebih terlindung dari unsur destruktif keserakahan para petualang ekonomi internasional.

Oleh karena itu, persoalan mutu sumber daya manusia menjadi taruhan utama. Dan di sinilah letak penting dan strategisnya *human investment* dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi itu adalah tugas kewajiban utama dunia pendidikan, dengan puncaknya dalam kegiatan pendidikan dan penelitian ilmiah perguruan tinggi. Semangat untuk ikut melakukan investasi itulah sesungguhnya yang harus ditanamkan dalam hati setiap pemimpin, tokoh masyarakat dan kita semua sehingga cita-cita menuju terbinanya peradaban baru Indonesia, dalam masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, insya Allah bisa terlaksana.

Wa'llāh a'lam bi'l-shawāb. ❖